

TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan																																																									
INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)	Indeks Pelayanan Publik																																																									
SASARAN (POKIN LEVEL 2)	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di kecamatan																																																									
INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)	RBM Kecamatan																																																									
PROGRAM (SPO)	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN					2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3. PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																																					
SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	MENINGKATNYA FASILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					MENINGKATNYA FASILITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					MENINGKATNYA KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN					MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Wringinom																																					
INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)	Persentase layanan yang diselesaikan tepat waktu					Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					Persentase gangguan transibum di kecamatan yang di tangani					Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa					Persentase ketercapaian sasaran program OPD																																					
KEGIATAN (SPO)	1.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					2.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum					3.2 Koordinasi Penerapan dan Pengkajian Peraturan Daerah yang Tergas dan Tanggung di Bidang Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan					4.1 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					5.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan yang diselenggarakan di kecamatan					Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan					Terlaksananya tindak lanjut laporan gangguan transibumlinmas					Meningkatnya fasilitas administrasi pemerintahan desa/kelurahan					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja					Tertafasilasinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan					Tertafasilasinya pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Tertafasilasinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					Tertafasilasinya pemeliharaan barang milik Daerah																	
INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4)	Rata-rata waktu penyelesaian pelayanan					Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan					Persentase laporan gangguan transibumlinmas yang ditindaklanjuti					Persentase desa/kelurahan yang di fasilitas administrasi pemerintahan					Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja					Jumlah fasilitas pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyusunan Laporan keuangan					Jumlah penyediaan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah					Jumlah fasilitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah					Jumlah Fasilitas pemeliharaan barang milik Daerah																	
SUB KEGIATAN (SPO)	5.1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5.1.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5.1.1.2 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		5.1.1.3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5.1.1.4 Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5.1.1.5 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Tanggung di Bidang Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia		4.1.1 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4.1.2 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		5.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitisasi Realisasi Kinerja SKPD		5.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.3.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5.4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.4.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		5.4.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		5.5.1 Penyediaan a		5.5.2 Pemeliharaan n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5.5.3 Pemeliharaan	
SASARAN SUB KEGIATAN (SPO)	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Meningkatnya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Mitisasi Realisasi Kinerja SKPD		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Lainny yang		Terlaksananya Pemeliharaan a/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan	
INDIKATOR SUB KEGIATAN (SPO)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Jumlah Peralatan dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		Jumlah Pemeliharaan					